Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

EVALUASI AKUNTABILITAS DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENGGUNAAN SISKEUDES DI KABUPATEN OGAN ILIR

[1]Yuni Mulia Fitri, [2]Kusminaini Armin, [3]Riza Syahputera
[1,2,3] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang
Email: [1]yunimuliafitriyuni@gmail.com, [2]kusminaini_armin@univ-tridinanti.ac.id, [3]riza_syahputera@univ-tridinanti.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Akuntabilitas, Standar Akuntansi Pemerintahan, Siskeudes, Keuangan Desa.

Cara Sitasi:
Penulis, Yuni Mulia Fitri. "Evaluasi Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penggunaan Siskeudes di Kabupaten Ogan Ilir." Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah) Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif. Namun, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparatur desa, kemampuan staf yang belum optimal, serta keterlambatan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap penggunaan Siskeudes. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian meliputi 21 kantor desa di Kecamatan Tanjung Batu, sedangkan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling pada delapan kantor desa dengan jumlah 32 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Pengujian meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Siskeudes, demikian pula penerapan SAP. Secara simultan, kedua variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penggunaan Siskeudes. Akuntabilitas memiliki koefisien regresi lebih besar dibandingkan penerapan SAP, sehingga menunjukkan peran yang lebih dominan dalam model penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta peningkatan kompetensi aparatur desa. Oleh karena itu, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan perlu diperkuat untuk mendukung penggunaan Siskeudes yang lebih efektif, akurat, transparan, dan akuntabel.

Accountable village financial management in accordance with government accounting standards is an important aspect in realizing transparent and effective governance. However, the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency, still faces challenges, including limited understanding among village officials, suboptimal

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

staff proficiency, and delays in financial reporting. This study aims to analyze the influence of accountability and the application of Government Accounting Standards (SAP) on the use of Siskeudes. A quantitative approach using a survey method was employed. The study population consists of 21 village offices in Tanjung Batu District, with a sample of eight village offices selected via purposive sampling, resulting in 32 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the help of the SPSS version 26 application. Testing included validity, reliability, classical assumptions, and partial and simultaneous hypothesis testing. The results indicate that accountability has a positive and significant impact on the use of Siskeudes, as does the application of SAP. Both variables, when considered simultaneously, exert a significant influence on the use of Siskeudes. Accountability exhibits a larger regression coefficient than the application of SAP, suggesting a more dominant role within the research model. These findings underscore the importance of financial management accountability, compliance with accounting standards, and the enhancement of village official competency. Therefore, training, coaching, and supervision need to be strengthened to support the use of Siskeudes that is more effective, accurate, transparent, and accountable.

Pendahuluan

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa sebagai konsekuensi perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dikembangkanlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan (BPKP, 2018). Dari pernyataan BPKP ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan langkah penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk menyederhanakan, memudahkan operasional, dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk lebih efektif dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan dan menghasilkan informasi keuangan yang benar untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing dalam pelaporan keuangan. Sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai pertaturan yang berlaku seperti laporan realisasi, APB Desa dan laporan lainnya. Dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), dan laporan penatausahaan seperti Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register. Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa, Arfiansyah (2020:70).

Kecamatan Tanjung Batu merupakan salah satu kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di Ogan Ilir, yang terdapat 21 (dua puluh satu) desa dan 1 (satu) kelurahan. Kecamatan Tanjung Batu termasuk ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Susunan Organisasi Administrasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu sudah lama diterapkan, namun masih kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu disebabkan kurang maksimalnya dalam proses kemampuan staf. Berdasarkan fakta, akuntabilitas yang rendah di tingkat desa dapat memunculkan praktik penambahan harga yang tidak sah (*mark up*), dimana penggunaan dana desa tidak terawasi dengan baik dan memungkinkan adanya penyelewengan. Penyelewengan kekuasaan yang dilakukan kepala desa atau tindakan-tindakan di mana kepala desa menggunakan kekuasaannya secara tidak benar atau melampaui wewenangnya. Hal ini sering kali terjadi ketika kepala desa atau staf menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara seperti manipulasi dalam pengelolaan dana desa, pengaturan perijinan, atau pembagian sumber daya.

Untuk mencegah tindak pidana ekonomi dana desa oleh kepala desa dan staf, langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, membangun budaya organisasi yang menekankan integritas dan etika, memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada staf, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Masyarakat juga perlu dilibatkan aktif dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa untuk mengurangi risiko penyelewengan.

Peran pemimpin masih belum tegas terhadap staf dalam memberikan dukungan atasan, kejelasan tujuan serta pelatihan yang sangat dibutuhkan dan mendorong staf mengikuti penerapan standar akuntansi keuangan yang dimana sebagian staf belum mengerti atau belum paham, sehingga penyelewengan dan kecurangan dapat dicegah terhadap kegunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang membangun budaya transparansi, integritas, dan pengawasan yang kuat. Dengan memperkuat kedua aspek ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap tindak pidana ekonomi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kunci terkait pengaruh akuntabiltas dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun kebijakan dan regulasi mengenai akuntabilitas dan standar akuntansi sudah di tetapkan dengan jelas, terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapannya yang mempengaruhi efektivitas sistem keuangan desa. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman staf mengenai akuntabilitas dan standar akuntansi pemerintah. Penelitian oleh Fatimah (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman yang kurang dapat mengakibatkan pelaporan keuangan yang tidak akurat dan rendahnya transparansi. Nufaisa (2022) juga menyoroti bahwa staf yang tidak terlatih baik dalam prinsip-

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

prinsip akuntansi pemerintahan sering mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana peningkatan pemahaman dan pelatihan staf dapat mempengaruhi akuntabilitas dan penggunaan Siskeudes.

Selain itu, penerapan standar akuntansi pemerintah masih menghadapi tantangan. Meskipun Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat indikasi bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Wijaya dan Irfan (2022) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara umum memberikan dampak positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan teknis dan keterbatasan sumber daya mungkin masih ada dan tidak teridentifikasi dalam penelitian tersebut. Ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala spesifik dalam penerapan SAP di tingkat desa dan dampaknya terhadap kinerja Siskeudes.

Dampak keterbatasan dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian oleh Ariyanti (2023) menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes dirancang untuk mengurangi penyelewengan, implementasi yang tidak optimal masih sering terjadi. Penelitian ini perlu menggali lebih dalam mengenai bagaimana keterbatasan dalam Siskeudes, seperti fitur-fitur yang tidak memadai atau kesalahan operasional, mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana masalah teknis dan non-teknis dalam Siskeudes berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Hubungan antara pendidikan aparatur desa dan akuntabilitas keuangan juga menjadi perhatian. Penelitian oleh Suwarno (2023) menunjukkan bahwa pendidikan aparatur desa yang memadai berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM, yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengalaman, berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penerapan sistem akuntansi yang baik dan komitmen pimpinan juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa sinergi antara faktor-faktor ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menilai bagaimana tingkat pendidikan dan pemahaman aparatur desa di Kecamatan Tanjung Batu mempengaruhi akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam konteks Siskeudes. Penelitian ini lanjut diperlukan untuk menilai bagaimana pelatihan dan pendidikan aparatur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan mengurangi praktik penyelewengan.

Akhirnya, peran pengawasan dalam mencegah penyelewengan dana desa perlu lebih dalam. Meskipun sudah ada pengawasan internal dan eksternal yang diatur, banyak kasus penyelwengan dana desa menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Indra dan Marissa (2022) menyoroti pentingnya peran pengawasan dalam mencegah tindak pidana ekonomi. Namun belum ada studi yang fokus pada efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks implementasi Siskeudes Di Kecamatan Tanjung Batu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengawasan dapat di perkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyelewengan.

Dengan demikian, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bukan hanya menjadi alat administratif semata, tetapi juga instrumen penting dalam upaya pencegahan penyelewengan dana desa. Dengan meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpotensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih terpercaya dalam pengelolaan keuangan desa, serta mendorong penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kajian Pustaka

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2016:19), Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat. Menurut Yusri dan Chairina (2023:47), Menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah desa dalam mengungkapkan segala aktivitas yang telah dibiayai anggaran wajib, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dilakukan.

Dalam akuntabilitas media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, namun juga mencakup aspek aspek kemudahan pemberi amanah dalam mendapatkan informasi terkait, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, serta informasi yang didapatkan secara secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas tersebut dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan keterbukaan atas dasar pertanggungjawaban (Anggraini,2020:22). Menurut Yusri dan Chairina (2023:50), Akuntabilitas publik terdiri dari 2 jenis:

1. Akuntabilitas Vertikal

   Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal

   Pertanggung jawaban horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dikutip dari Khasanah dan Nilasari (2023:283), terdapat beberapa indikator dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Para anggota IKAPI menyatakan terdapat delapan indikator diantaranya yaitu:

1. Basis yang digunakan yaitu basis akuntansi
2. Penyajian dalam bentuk wajar
3. Konsisten
4. Mempunyai nilai historis
5. Substansi melebihi bentuk formal
6. Merealisasikan
7. Kelengkapan yang dipublikasikan
8. Periodisitas

Berdasarkan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator standar akuntansi pemerintahan yaitu regulasi harus sesuai dengan kebijakan, sistem dan sarana pendukung harus memadai dan sumber daya manusia yang paham dan mampu menjalankan standar akuntansi tersebut.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengurus Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengperasikan aplikasi Siskeudes.

Sistem keuangan Desa (Siskeudes) merupakan alat pemantauan dan benchmarking pengelolaan keuangan desa agar tetap berpegang pada batasan hukum (Milenia et al., 2022). Dari pengertian di atas, dapat disimpulakn bahwa dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), desa-desa dapat melakukan pemantauan secara lebih terstruktur terhadap pengelolaan keuangannya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang ada, serta memungkinkan untuk melakukan perbandingan atau benchmarking terhadap kinerja keuangan desa dengan desa-desa lainnya.

Untuk memudahkan penyebarannya, sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah program berbasis web yang membutuhkan user id dan password khusus untuk masyarakat. Untuk mencapai pengelolaan yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif, program Siskeudes dapat digunakan dari jarak jauh. Langkah pertama adalah memasukkan informasi dasar yang diperlukan (Nadilla & Kamilah, 2023).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat menggunakan database Microsoft Access, yang membuatnya lebih mudah untuk diangkut dan diakses oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Microsoft Access adalah sebuah perangkat lunak manajemen basis data relasional yang relatif mudah digunakan dan dapat dioperasikan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dalam pengelolaan data. Dengan menggunakan *Microsoft Access* sebagai basis datanya, memberikan kemudahan dalam hal portabilitas, aksesibilitas, dan fleksibilitas, yang semuanya mendukung tujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Output dapat disajikan dalam bentuk laporan dan dokumen administrasi, seperti bukti kwitansi, dokumen administrasi, Surat Setoran Pajak (SSP), Permintaan Pembayaran (SPP), dan dokumen lainnya, Laporan Penganggaran (RAB, Perdes APB Desa, APB Desa yang bersumber dari dana), Laporan Administrasi (buku kas umum, buku pembantu, buku pajak, buku bank, dan buku regis), dan sebagainya (Hidayani et all, 2023).

Aplikasi Siskeudes dikembangkan BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan berikut dengan pelaporan keuangan desa (Malaha et al., 2020).

1. Memastikan semua tingkat pemerintahan memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk memberlakukan UU Desa, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan desa.
2. Pemerintah daerah mampu melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa yang transparan yang seperti persiapan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pengawasan.
3. Pemerintah desa diberikan kelonggaran yang signifikan untuk menangani masalah-masalah pemerintahan, seperti pengelolaan fiskal, dan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di daerah pedesaan. (Hidayani et all, 2023).

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Indikator Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Menurut Gayatri dan Latrini (2018:115), indikator suatu sistem keuangan Desa dikatakan efektif jika:

1. Keamanan Data
   Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun tindakan kekeliruan manusia dan dari tingkat kemampuan teknologi canggih dalam mengantisipasi *illegal acces* serta kerusakan sistem.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu
   Tingkat kemampuan sistem informasi berbasi teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.
3. Ketelitian
   Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan bisa terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu: kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
4. Variasi Laporan atau Output
   Berbicara mengenai variasi laporan atau output maka tidak saja mengenai tingkat volume dari suatu teknologi tetapi juga mengenai tingkat informasinya. Untuk mengetahui kemampuan sistem informasi berbasis teknologi maka perlu dilihat dari kemapuannya dalam membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5. Relevansi
   Suatu tingkat penilaian yang ditunjukkan dari manfaat suatu sistem dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator ini bertujuan menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

Metodologi Penelitian

Populasi dan sampel

Berdasarkan pengertian populasi maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan total Kantor Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Batu yaitu sebanyak 21 Kantor Desa. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Menurut Sugiyono (2022:127), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan tidak memungkin peneliti mempelajari semua yang ada pada populasi, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Berikut adalah sampel penelitian pada tabel.1:

Tabel 1
Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	*Jumlah*
Jumlah Kantor Desa di Kecamatan Tanjung Batu	21
Jumlah Kantor Desa yang memenuhi kriteria sampel	8
Jumlah kesubbag perencanaan dan keuangan	4
Total sampel (8 x 4)	32

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

(Sumber : penulis, 2024)

Sampling

Menurut Sugiyono (2022:128), sampling adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling,* yaitu teknik penelitian sampel dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu. Adapun kriteria sampling dalam penelitian ini yaitu:

1. Kantor Desa Kecamatan Tanjung Batu yaitu 21 Kantor Desa.
2. Kemudahan akses pada 8 Kantor Desa Kecamatan Tanjung Batu.

Tabel 2
Kriteria Pemilihan Sampel

No	*Nama Desa*	*Kriteria*		*Keterangan*
		1	**2**	
1	Bangun Jaya	√	√	Terpilih
2	Burai	√	X	Gugur
3	Limbang Jaya I	√	X	Gugur
4	Limbang Jaya II	√	X	Gugur
5	Pajar/Fajar Bulan	√	X	Gugur
6	Sentul	√	X	Gugur
7	Senuro Barat	√	X	Gugur
8	Senuro Timur	√	X	Gugur
9	Seri Bandung	√	√	Terpilih
10	Seri Tanjung	√	√	Terpilih
11	Tanjung Atap	√	√	Terpilih
12	Tanjung Atap Barat	√	√	Terpilih
13	Tanjung Batu Petai	√	√	Terpilih
14	Tanjung Batu	√	X	Gugur
15	Tanjung Batu Seberang	√	√	Terpilih
16	Tanjung Batu Timur	√	X	Gugur
17	Tanjung Laut	√	X	Gugur
18	Tanjung Pinang 1	√	X	Gugur
19	Tanjung Pinang II	√	X	Gugur
20	Tanjung Tambak	√	X	Gugur
21	Tanjung Tambak Baru	√	√	Terpilih

(Sumber : penulis, 2024)

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda atau yang disebut analisis regresi multiple merupakan perluasan dari analisis regresi linier sederhana, dimana analisis ini melibatkan beberapa variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2018:95) analisis regresi berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat. Hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat tergantung secara fungsional dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta 0 + \beta 1X_1 + \beta 2X_2 \ \mu$$

Ket:
Y = Sistem Keuangan Desa
X_1 = Akuntabilitas
X_2 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
$\beta 0$ = Konstanta
μ = Error

Uji F (Simultan)

Dalam Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali 2018:28). Untuk pengujian pengaruh simultan digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

Ho : $\beta 1 = 0$ Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Ha : $\beta 1 \neq 0$ Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruuh terhadap Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Untuk F kriteria yang digunakan adalah:

1. Ho : ditolak jika Sig F hitung < α (tingkat signifikan yang digunakan)
2. Ha : diterima jika Sig F hitung > α (tingkat signifikan yang digunakan)

Jika terjadi penolakan Ho diartikan sebagai adanya pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen. Sebaliknya, jika terjadi penerimaan Ho diartikan sebagai tidak adanya pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

Uji t (Parsial)

Uji ukur t merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah masing masing dari variabel bebas secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yang dikemukakan (Ghozali, 2018:98). Dengan kata lain untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Dimana jika t hitung > t tabel H1 diterima (signifikan) dan jika t hitung < t tabel H0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

Karakteristik Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah 8 kantor desa di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, respoden yang diambil adalah sebanyak 32 responden. Dalam pembagian kuesioer dilakukan secara langsung oleh peneliti, karena lebih efektuf dan meningkatkan respon rate dari responden. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner pada tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 10 Mei 2025.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Cara yang digunakan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi responden dalam penelitian ini, maka diperlukan gambaran mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir.

Tabel 4.1
Karakteristik Berdasarkan Usia

No.	*Usia*	*Jumlah*	*Persentase (%)*
1	< 25 Tahun	2	6.25%
2	25 - 34 Tahun	7	21.88%
3	35 - 44 Tahun	15	46.88%
4	< 45 Tahun	8	25%
Total		**32**	**100%**

Sumber : Data Primer

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa hasil survey terhadap 32 responden dari 8 kantor desa di Kecamatan Tanjung Batu, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 6.25% untuk usia < 25 tahun, 7 orang atau sebesar 21.88% untuk usia 25 – 34 tahun, 15 orang atau sebesar 46.88% untuk usia 35 – 44 tahun, dan sebanyak 8 orang atau sebesar 25% untuk yang berusia < 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar staf kantor desa di kecamatan Tanjung Batu berada pada usia produktif, yaitu pada kelompok usia 35–44 tahun. Selain itu, keberadaan responden dari kelompok usia muda <25 tahun meskipun jumlahnya paling sedikit, menunjukkan adanya regenerasi staf di kantor desa. Sementara itu, kelompok usia di atas 45 tahun tetap memiliki peran penting karena dianggap telah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan desa.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**	**persentase (%)**
1	Laki-laki	19	59.38%
2	Perempuan	13	40. 63%
Total		**32**	**100%**

Sumber : Data Primer

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa hasil survey terhadap 32 responden dari 8 kantor desa di Kecamatan Tanjung Batu, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu untuk Laki-laki sebanyak 19 orang atau sebesar 59.38% dan Perempuan sebayak 13 orang atau sebesar 40. 63%. Hal ini meunnjukkan, bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan yang bekerja di kantor desa di kecamatan Tanjung Batu.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	**Pendidikan Terakhir**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
1	SMA/SMU	29	90. 63%
2	Diploma	1	3.13%
3	S1	2	6.25%
4	S2	-	0%
Total		**32**	**100%**

Sumber : Data Primer

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Tabel 4.3 Menunjukkan hasil survey terhadap 32 responden dari 8 kantor desa Kecamatan Tanjung Batu, diketahui bahwa sebagian besar respoden dengan pendidikan terakhir pada jenjang SMA/SMU yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 90. 63%. Sementara itu, responden yang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma berjumlah 1 orang atau sebesar 3.13%, dan yang berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 2 orang atau sebesar 6.25%. Hal ini membuktikan, bahwa kantor desa di kecamatan Tanjung Batu tidak memprioritaskan pendidikan terakhir dalam mencari staf seperti halnya Strata 2 tidak ada.

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Hasil uji validitas terhadap variabel Akuntabilitas digunakan untuk mengukur masing-masing pernyataan yang telah disusun ke dalam kuesioner. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X_1)

No	**Total Pearson Correlation (r hitung)**	**Nilai r tabel**	**Keterangan**
1	0,646	0,349	Valid
2	0,794	0,349	Valid
3	0,710	0,349	Valid
4	0,639	0,349	Valid
5	0,687	0,349	Valid

Sumber: Hasil Pengelola Data SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.4 Hasil dari uji validitas Akuntabilitas diperoleh seluruh pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid karena nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel} dengan total *Pearson Correlation* (r_{hitung}) yang tertinggi adalah 0,794. Maka, dari uji validitas ini dapat dilanjutkan ke uji berikutnya.

Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil uji validitas terhadap variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk mengukur masing-masing pernyataan yang telah disusun ke dalam kuesioner. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2)

No	**Total Pearson Correlation (r hitung)**	**Nilai r tabel**	**Keterangan**
1	0,458	0,684	Valid
2	0,357	0,510	Valid
3	0,601	0,656	Valid
4	0,375	0,520	Valid
5	0,684	0,423	Valid
6	0,689	0,411	Valid
7	0, 515	0,460	Valid
8	0,495	0,439	Valid
9	0,539	0,673	Valid
10	0,451	0,383	Valid

Sumber: Hasil Pengelola Data SPSS Versi 26

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Berdasarkan tabel 4.5 Hasil dari uji validitas Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) diperoleh seluruh pernyataan dalam kuesioner diakatakan valid karena nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel} dengan total *Pearson Correlation* (r_{hitung}) yang tertinggi adalah 0,684. Maka, dari uji validitas ini dapat dilanjutkan ke uji berikutnya.

Uji Validitas Sistem Keuangan Desa

Hasil uji validitas terhadap variabel Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Y) digunakan untuk mengukur masing-masing pernyataan yang telah disusun ke dalam kuesioner. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan Desa (Y)

No	**Total Pearson Correlation (r hitung)**	**Nilai r tabel**	**Keterangan**
1	0,609	0,349	Valid
2	0,609	0,349	Valid
3	0,659	0,349	Valid
4	0,594	0,349	Valid
5	0,684	0,349	Valid
6	0,473	0,349	Valid
7	0,727	0,349	Valid
8	0,450	0,349	Valid
9	0,499	0,349	Valid
10	0,677	0,349	Valid

Sumber: Hasil Pengelola Data SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.6 Hasil dari uji validitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperoleh seluruh pernyataan dalam kuesioner diakatakan valid karena nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel} dengan total *Pearson Correlation* (r_{hitung}) yang tertinggi adalah 0,727. Maka, dari uji validitas ini dapat dilanjutkan ke uji berikutnya.

Hasil Uji Reabilitas

Setalah uji validitas dilakukan, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mnegukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dinilai memiliki reliabilitas yang baik apabila respons individu terhadap item-item yang ada menunjukkan konsistensi dalam berbagai waktu pengukuran. Reliabilitas suatu variabel yang dibentuk dari serangkaian pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu jika nilai koefisien *cronbach's alpha* > r_{tabel} yaitu 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai (r_{hitung}) *cronbach's alpha*	Nilai r_{tabel}	Keterangan
X1	0,728	0,349	Reliabel
X2	0,688	0,349	Reliabel
Y	0,800	0,349	Reliabel

Sumber : Hasil Pengelola Data SPSS Versi 26

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Tabel 4.7 hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien *cronbach's alpha* dari seluruh variabel yang yang telah diuji memiliki nilai di atas 0,6 dan nilai yang tertinggi adalah 0,800 pada variabel Sistem Keuangan Desa (Y). Maka dapat disimpulkan, bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan untuk menguji melihat normal tidaknya nilai residu. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan teknik *kolmogorov-smirnov*, dengan kriteria jika hasil signifikansi kolmogorov-smirnov menunjukkan signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal. Namun jika hasil signifikansi kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikan < 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukan bahwa data yang diginakan berdistribusi dengan normal, dapat dibuktikan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas *One – Sample Kolmogorov - Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.26531758
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.096
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4.8 menunjukan hasil dari nilai normalitas besarnya *Tes Statistic kolmogorov – smirnov* sebesar yaitu 0,117 dan signifikan pada 0,200. Sehingga dari data nilai tersebut dinyatakan bahwa data yang diperoleh dari penelitian berdistribusi normal dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila data terjadi korelasi, maka ada masalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kriteria dalam uji multikolinearitas yaitu nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10. Hasil perhitungan statistic uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.915	5.495		-.349	.730		
	Akuntabilitas	.952	.153	.639	6.205	.000	1.000	1.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.604	.115	.539	5.232	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Sistem Keuangan Desa
Sumber: Hasil Pengolah Data SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji multikolineraritas di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* X_1 dan X_2 adalah 1,000 yaitu lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) X_1 dan X_2 adalah 1,000 yaitu lebih kecil dari 10. Maka dari hasil di atas dinyatakan bahwa data tersebut tidak terdapat multikolinearitas dan dapat di lanjutkan ke uji berikutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glesjer. Dengan persyaratan sig lebih besar dari 0,05 baru dikatakan model regresi linier tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.957	2.775		-.345	.733
	Akuntabilitas	.013	.077	.030	.164	.871
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.067	.058	.209	1.153	.258

a. Dependent Variable: RES_2
Sumber : Hasil Pengolah Data SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji glasjer lebih besar dari 0,05. Dimana nilai variabel bebas akuntabilitas (X_1) adalah 0.871 dan penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) adalah 0,258. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur atau menguji hipotesis. Analisis regresi linier berganda juga digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadapat variavel terikat.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.915	5.495		-.349	.730		
	Akuntabilitas	.952	.153	.639	6.205	.000	1.000	1.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.604	.115	.539	5.232	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Sistem Keuangan Desa
Sumber : Hasil Pengolah SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.11 Maka dapat dilakukan suatu persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = -1{,}915 + 0{,}952\ X_1 + 0{,}604\ X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta adalah sebesar -1,915. Berarti jika variabel akuntabilitas (X_1), penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) bernilai 0, maka sistem keuangan desa (Siskeudes) (Y) sebesar -1,915. Akuntabilitas memiliki nilia koefisien regresi terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) sebanyak 0,952 atau 95,2% artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) dan nilasi regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_2) yaitu sebanyak 0,604 atau 60,4% artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes).

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi akuntabilitas (0,952) dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (0,604), karena 0,952 > 0,604 maka secara arah pengaruh, akuntabilitas merupakan variabel yang lebih dominan dibandingkan penerap standar akuntansi pemerintahan terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes).

Uji F (Simultan)

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan menggunakan metode anova. Dengan kriteria signifikasi < 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12
Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	358.418	2	179.209	32.669	.000[b]
	Residual	159.082	29	5.486		
	Total	517.500	31			

a. Dependent Variable: Sistem Keuangan Desa
b. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas
Sumber : Hasil Pengolah Data SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 4.12 Hasil dari uji F diketahui F_{hitung} sebesar 32,669 dengan tingkat sig 0,000, karena sig F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi, ada pengaruh terhadap akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Uji Hipotesis Parsial

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t dapat dilihat dengan meggunakan nilai signifikasi < 0,05 maka terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika nilai signifikasi > 0,05 maka tidak berpengaruh.

Tabel 4.13
Hasil Uji t
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-1.915	5.495		-.349	.730
	Akuntabilitas	.952	.153	.639	6.205	.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	.604	.115	.539	5.232	.000

a. Dependent Variable: Sistem Keuangan Desa

Sumber : Hasil Pengolah Data SPSS Versi 26

Nilai t tabel 1,695 pada signifikasi 5%. Oleh karena itu, diperoleh hasil berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Sistem Keuangan Desa. Dari tabel 4.13 diketahui nilai t_{hitung} (6,205) > t_{tabel} (1,695) dan sig (0,000) < (0,05). Hal ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, berarti veriabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes). Artinya, hipotesis pertama diterima.
2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Sistem Keuangan Desa. Dari tabel 4.13 diketahui nilai t_{hitung} (5,232) > t_{tabel} (1,695) dan sig (0,000) < (0,05). Hal ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, berarti variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem keuangan desa (siskeudes). Artinya, hipotesis kedua juga diterima.
3. Akuntabilitas horizontal
   Pertanggung jawaban horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada hal apa yang benar-benar terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi hambatan atau penyimpangan, maka hambatan atau penyimpangan tersebut harus segera dikoreksi. Maka, pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan akuntabilitas meliputi beberapa aspek pertanggungjabawan atas tindakan penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap kegiatan yang dilakukan, serta hasil program dan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Selain itu akuntabilitas juga mencakup kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan serta menjawab segala hal yang menyangkut keputusan dan hasil yang dilakukan.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi yang baik merupakan dua faktor krusial dalam membangun sistem keuangan desa yang sehat dan terpercaya. Hasil ini juga mengimplikasikan bahwa upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal akuntabilitas dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus terus ditingkatkan, baik melalui pelatihan, pembinaan, maupun pengawa Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* yang menekankan pentingnya tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan dan penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks keuangan desa, akuntabilitas mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran desa secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Artinya, bahwa Akuntabilitas dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersebut penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Siskeudes. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparatur desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa yang dilakukan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Artinya, implementasi standar akuntansi pemerintahan yang tepat membantu perangkat desa menyusun laporan keuangan secara akurat dan sesuai regulasi.

Daftar Pustaka

Anggraini, Novia, 2020, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,* Skripsi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), *3*(1).

Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa pada Masa Pandemi Covid-19.* JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13(1), 12–23.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES. 24 Juni 2024,

Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta

Edowai, Mikael, dkk., 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pusaka Almaida: Sulawesi Selatan.

Gayatri, Latrini. (2018). *Efektivitas aplikasi system pelaporan keuangan Desa (studi tentang aplikasi pelaporan keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolanyu Kabupaten Tulungagung).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung. Tulungagung. Indonesia.

Ghozali, 1, 2018, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Dipenegoro: Semarang.

Hidayani, S., Kamilah, K., Tambunan, K. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 8(3), 409.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Khasanah, U., Nilasari, A. P. (2023). *Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 3(1), 283.

Krina, Loina Lalolo, 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta.

Mahmudi, 2016, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu YKPN: Yogyakarta.

Malaha, A., Dunggio, T., & Suleman, J. (2020). *Analisis Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Laboran di Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri Gorontalo*. Journal of Health, Technology and Science (JHTS), 1(1), 1-6.

Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 7(2), 67-81.

Nadilla, N., & Kamilah, K. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam,* 4(6), 1582-1591.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Susunan Organisasi Administrasi Kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta.

Restufiani, Alfi, 2022, *"Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Wonosari Kabupaten Malang)"*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Scott, R, William, 2015, *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition, Pearson Prentise Hall: Toronto.

Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. PT Alfabet :Bandung.

Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. PT Alfabet :Bandung.

Sujarweni, Wiratna V, 2019, *Akuntansi Sektor Publik*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*.

Wardoyo, Dwi Urip, .,Dkk, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan". Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Desember, 2022, Hal 39-43.

Yanti, Fitri, 2019, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyajian Laporan Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa (Add) Desa Rantau Bayur Sumatera Selatan Pada Implementasi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Skripsi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Yusri dan Chairina, 2023, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Cetakan Pertama, PT Inovasi Pratama Internasional Anggota IKAPI: Padang Sidempuan.